

Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun Demokratisasi di Daerah

Eko Harry Susanto
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S.Parman No.1 Jakarta 11440
HP. 0818126750, e-mail: ekohs@centrin.net.id

Abstract

Freedom of information that is supported by various regulations, enabling the media to spread the message to the public. Increasingly diverse information in line with the principle of public disclosure. National mass media is difficult to provide appropriate information to the public information needs in areas that related to local government activities. The scope of this research focuses on online media coverage, about the existence of local media. The purpose of this study to describe the kompas.com news, about the local media and to understand his existence in establishing democratic governance in the region. The research method used qualitative content analysis to examine the statements of the local press in kompas.com, from 2008 until May 2011. The study findings that the liberated from the criticality of the information media, the conflict between the local media with the authorities, and the development of democracy in the government as demanded by the community.

Abstrak

Kebebasan informasi yang didukung oleh berbagai peraturan, memberikan keleluasaan media untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat. Kebutuhan informasi semakin beragam sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Media massa nasional sulit untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi khalayak di daerah yang menyangkut kegiatan pemerintah daerah. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pemberitaan media *online*, tentang eksistensi media lokal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberitaan kompas.com, tentang media lokal dan untuk memahami eksistensinya dalam membangun demokratisasi pemerintahan di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif untuk menelaah pernyataan tentang pers lokal di kompas.com, dari tahun 2008 sampai dengan Mei 2011. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebebasan informasi membentuk kekritisian pemberitaan media, konflik antara media lokal dengan penguasa, dan berkembangnya demokrasi dalam pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat.

Kata kunci: eksistensi media lokal dan kebebasan informasi

Pendahuluan

Reformasi politik tahun 1998, berdampak terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi publik yang semula menjadi kekuasaan pemerintah, yang dikelola secara ketat oleh manajemen komunikasi pemegang kekuasaan, semakin pudar sejalan dengan eksistensi transparansi dan demokratisasi semua bidang kehidupan. Persoalannya kebebasan komunikasi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi di lingkungan masyarakat majemuk.

Salah satu problem kebebasan komunikasi dan informasi adalah peran media massa, tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung etika pemberitaan. Secara umum, menurut Abraham Lincoln, “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sebagai pendukung utama pilar perubahan, media massa konvensional maupun media baru diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang demokrasi (Urofsky, 2001:1).

Berdasarkan pernyataan umum hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan mencari, menerima, serta menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas” (Asasi, Juni 1999). Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F, menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Merujuk kepada pernyataan tersebut, hak memperoleh informasi menjadi kebutuhan masyarakat yang demokratis. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, masyarakat dapat memperoleh informasi transparan dan faktual sesuai dengan kebutuhan. Dukungan terhadap keterbukaan informasi dari media massa semakin menguat setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang mengatur tentang keterbukaan informasi dari badan publik.

Pemerintah daerah sebagai badan publik, memiliki peran yang semakin kuat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat setempat. Terkait dengan harapan tersebut, kebutuhan informasi atau pemberitaan spesifik dari media yang menyoroti peristiwa di daerah semakin meningkat. Di sisi lain, media nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat di daerah.

Dalam mengantisipasi kebutuhan informasi itu, tumbuh media lokal yang berupaya untuk memberitakan peristiwa daerah maupun kinerja pemerintah di wilayahnya. Pemberitaan media lokal kegiatan pemerintahan, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya demokrasi di daerah. Sebab, pemerintahan merupakan, lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan, melalui aturan-aturan yang harus dijalankan (Syafie, 2003:3).

Keberadaan media lokal yang mengeksplorasi seluk beluk kondisi daerah, menjadikan media lokal dijadikan sumber informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah (2001:7), “media tidak boleh lepas dari konteks sosial dan kebudayaan yang dikehendaki oleh khalayak-pembaca, pendengar, dan penonton”.

Dinamika keberadaan media di daerah, tidak bisa dilepaskan dari karakter media massa yang terdapat dalam *The Four Theory of Press*. Menurut Sibert, Paterson, dan Schraam, terdapat empat ragam teori media, yaitu; (1) Teori Otoriter (*Authoritarian Theory*), yang memposisikan pers mendukung kebijakan pemerintah, (2) Teori Libertarian, merujuk kepada pemberitaan harus bebas sensor dan mendukung filosofi manusia yang bebas menentukan nasibnya sendiri, (3) Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*), yang menekankan media wajib memenuhi kebutuhan informasi yang benar, obyektif dan seimbang, dan (4) Teori Media Soviet (*Soviet-Totalitarian*), yang menegaskan, media harus dimiliki negara dan mendukung kelanjutan sistem pemerintahan (McQuail, 2010:175).

Di sisi lain, Indonesia juga mengenal model Pers Pancasila, seperti tertera pada UU No.21 Tahun 1982, yang intinya, sistem pers nasional memberikan sumbangan ke arah tegaknya kehidupan demokrasi Pancasila, yang bertanggung-

jawab. Penerbitan pers harus menggunakan ijin dikeluarkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan reformasi politik, sistem pers berubah dan mampu mendorong munculnya media lokal, yang dapat memberikan informasi berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan survei Serikat Penerbit Surat Kabar (*Media Planning Guide*, 2008: 57), surat kabar harian dan tabloid yang terbit di Jakarta dan Pulau Jawa, berjumlah 182 media, atau sekitar 37 persen, sedangkan 63 persen lainnya tersebar di luar Pulau Jawa. Televisi swasta memiliki jangkauan siaran nasional, unggul dalam menarik pemirsa, tetapi program tayangan televisi lokal dari Jawa Pos Media Televisi (JTV) Surabaya dan Riau Televisi mampu menarik khalayak di daerah. Jumlah keseluruhan stasiun televisi lokal, yang beroperasi adalah 104 buah tersebar di seluruh Indonesia (*Media Planning Guide*, 2008:433).

Dinamika media massa lokal sebagai ruang lingkup penelitian ini memfokuskan kepada berita *Kompas.com*, tentang eksistensi media lokal dalam pemberitaan, yang menyangkut jalannya pemerintahan di daerah. Keberadaan media massa lokal, merujuk kepada empat teori pers (*The Four Theory of the Press*) dan sistem Pers Pancasila, yang pernah diberlakukan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Apa saja isi pemberitaan yang menyangkut media lokal di *kompas.com*? (2) Bagaimana isi pemberitaan tentang keberadaan media lokal dan sejauh mana media lokal mampu membangun demokrasi pemerintahan di daerah?

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mendeskripsikan berbagai macam isi pemberitaan tentang media lokal; (2) mendeskripsikan eksistensi media lokal dalam membangun demokratisasi pemerintahan di daerah. Manfaat penelitian ini yaitu mendorong pemberitaan pers di daerah agar sesuai dengan prinsip keterbukaan dan demokrasi informasi.

Penelitian ini menggunakan Teori peran media dari Lippmann bahwa media berperan sebagai faktor yang mengabsahkan sesuatu yang sudah ada dalam benak atau pikiran seseorang, tentang realita sosial yang ada (Suwardi, 1993:62). Guna menguatkan eksistensi realitas media, digunakan Teori Konstruksi Sosial dari Berger dan

Luckmann, yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia dibangun melalui interaksi sosial. Identitas suatu objek merupakan hasil dari bagaimana kita membicarakan objek bersangkutan, bahasa digunakan untuk menuangkan konsep dan cara bagaimana kelompok sosial memberikan pengalaman baru mereka (Morissan dan Wardhani, 2009:39).

Guna mengulas realitas media dalam hubungannya dengan masyarakat dan pemerintahan, berpijak kepada Teori Hegemoni Media Gramsci, yang secara substantif menyatakan bahwa media massa dikendalikan oleh golongan yang dominan dalam masyarakat, dan membantu golongan itu dalam menggunakan kekuasaannya di masyarakat (Severin dan Tankard, 2009: 337). Pada konteks ini, munculnya media lokal, merupakan upaya untuk melawan kekuatan media nasional yang didominasi pemberitaan di pusat kekuasaan, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan informasi khalayak di daerah. Teori lain yang mendukung kajian ini adalah, Teori Tanggung jawab Sosial dari *The Four Theory of Press*, mengingat bahwa media massa harus memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat (McQuail, 1991:117). Media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen dan kode etik profesional tentang kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan informasi dan menjaga pluralisme masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dengan menitikberatkan kepada analisis isi kualitatif. Menurut Subiyakto, “analisis isi terbagi dalam dua aliran metodologi yaitu kualitatif dan kuantitatif”. Kuantitatif berpedoman kepada filsafat positivisme, sedangkan kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif (Suyanto dan Sutinah, 2008:125). Menurut Holsti, analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Moleong, 2009:220). Analisis isi kualitatif ditujukan untuk memahami konteks pragmatik melihat hubungan satu pernyataan dengan pernyataan lain dalam kondisi tertentu (Jebarus, 2011:32). Dengan analisis isi kualitatif, maka dinamika media massa lokal dalam membangun demokratisasi di daerah, dapat ditelaah dari hu-

bugan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya dalam pemberitaan media.

Objek penelitian adalah berita seputar dinamika pers lokal di media *online Kompas.com* pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011. Pada kurun waktu tersebut, terjadi 21 kasus yang menyangkut problem media massa lokal. Dari seluruh berita tersebut, dibuat kategorisasi isi pemberitaan yang mengarah kepada eksistensi media lokal dalam mendorong tumbuhnya demokrasi. Penetapan berita merujuk kepada pendapat, bahwa analisis isi kualitatif, terkait dengan pemilihan isi berita tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian (McQuail, 2010:365).

Alasan menggunakan media *online Kompas.com*, didasarkan pada survei, bahwa *Kompas.com* termasuk 20 situs yang sering dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia (Kompas, 16 Juni 2011). Penggunaan media *online* yang didukung oleh internet, dapat dimanfaatkan dalam riset komunikasi (Rubin, Rubin and Piele, 2005: 15).

Menurut Guba dan Lincoln teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses media *online Kompas.com*, yang difokuskan pada data yang *nonhuman* berupa teks pemberitaan (Jebarus, 2011:31). Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman (1993:15), yang digunakan untuk memahami konteks pragmatik dalam melihat hubungan satu pernyataan dengan pernyataan lain. Keabsahan data berpijak kepada derajat kepercayaan (*credibility*) terhadap data yang diperoleh, keteralihan (*transferability*) data yang konteksnya sama, kebergantungan (*dependability*) dengan mengaudit seluruh catatan yang ada (Moleong, 2009:173). Dengan demikian validitas teks pemberitaan yang diperoleh dari *Kompas.com*, dapat diperoleh jika tidak ada penyimpangan dalam transfer data. Validitas data juga berpijak kepada teks pemberitaan yang masuk akal (*plausibility*) dalam penelitian kualitatif (David Silverman, 1993:155).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelaahan terhadap isi berita yang menyangkut media lokal di *Kompas.com*, tahun 2008 sampai dengan Mei 2010, ter-

dapat tiga kategori berita yang memiliki makna dinamika pers lokal dalam membangun demokrasi pemerintahan di daerah, yaitu; (1) Kebebasan informasi dan kekritisan media lokal; (2) Konflik antara wartawan dengan pejabat; (3) Demokratisasi bernegara. Pengkategorian dan penjelasan singkat isi berita adalah sebagai berikut; (1) Kategori: kebebasan informasi dan kekritisan media lokal. Judul berita: “Korban Kekerasan, Jurnalis Mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” (10 Mei 2011). Deskripsi: Seorang jurnalis kontributor *Vivanews, Harian Lokal Bintang Papua* dan *The Jakarta Globe*, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditusuk oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua. Bram, menceritakan, ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di rumah tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu (<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/20363972/Korban.Kekerasan.Jurnalis.Mengadu.ke.DPR>, diakses 18 Mei 2011).

(2) Kategori: konflik antara wartawan dengan pejabat. Judul berita: “Bupati Manggarai Barat Bantah Dalangi Tindak Kekerasan terhadap Wartawan” (17 Februari 2008). Deskripsi; Bupati Manggarai Barat membantah keras tudingan yang menyatakan bahwa pihaknya telah mendalangi kasus penganiayaan wartawan Pos Kupang, Yacobus Lewanmeru, di Labuan Bajo (kota kabupaten), Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. (<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/20363972/Korban.Kekerasan.Jurnalis.Mengadu.ke.DPR>, diakses 13 April 2011).

(3) Kategori: demokratisasi bernegara. Judul berita: “Dekati Pers, Kalla Kunjungi Redaksi Koran Lokal” (21 Juni 2009). Deskripsi: kunjungan Kalla ke kantor redaksi media lokal disebut-sebut bagian dari pendekatan ke sejumlah pimpinan redaksi lokal menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, delapan Juli mendatang. Selain juga Kalla ingin mengetahui cara kerja media lokal menyampaikan pemberitaan.

Setelah ke Gedung Suara Merdeka, Kalla dijadwalkan akan menemui pimpinan dan jajaran

redaksi Solo Pos di Kota Solo, pada sore harinya. (<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/21/1058034/Dekati.Pers.Kalla.Kunjungi.Redaksi.Koran.Lokal>, diakses 7 April 2011).

Selain tiga kategori tersebut, untuk memberikan gambaran yang terkait harapan masyarakat terhadap dinamika pers lokal, maka ditelaah dua pemberitaan lainnya, yaitu; (1) “Upah Jurnalis di Surabaya Belum Layak” Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen, Surabaya belum layak. (<http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.Layak>, akses 10 April 2011) dan (2) “Riau, Negeri Para Hedonis?”, yang mengungkapkan bahwa koran terbitan Riau hanya berisi acara seremonial didanai uang rakyat dari APBD. (<http://regional.kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau.Negeri.Para.Hedonis-5>, diakses 13 April 2011).

Kebebasan Informasi dan Kekritisan Media Lokal

Upaya media massa melakukan kritik terhadap kondisi pemerintahan di daerah, berhubungan dengan fungsi media sebagaimana dalam teori tanggung jawab sosial, yang terdapat dalam *The Four Theory of Press*. Media massa berperan dalam penyebaran informasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Craft, Light dan Godfrey (2001:6), menegaskan “fungsi media massa dapat dikelompokkan menjadi empat kategori umum, yaitu informasi, hiburan, persuasi dan bisnis”. Dari empat hal itu, informasi adalah hal yang paling penting bagi khalayak. Di samping itu, media telah menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dari citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. (Novianti, 2010: 169).

Pemberitaan media lokal tentang kekritis-an terhadap pemerintah daerah tampak dalam *Kompas.com*, tanggal 10 Mei 2011 “Korban Kekerasan, Jurnalis Mengadu ke DPR”. Pada intinya menginformasikan bahwa, seorang jurnalis kontributor *Vivanews*, *Harian Lokal Bintang Papua* dan *The Jakarta Globe*, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditusuk

oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua.

Berdasarkan berita tersebut, media lokal menunjukkan perhatiannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Informasi kekerasan terhadap wartawan akibat memberitakan perilaku aparat yang tidak bertanggungjawab, merupakan upaya media massa lokal menggambarkan realitas faktual untuk kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pendekatan hegemoni media, mereka yang memiliki kekuasaan berupaya untuk mengontrol media lokal.

Sesungguhnya, UU No. 40/1999 tentang Pers tidak mengenal media massa lokal. Dalam UU No.32/ 2002 tentang Penyiaran, terdapat lembaga penyiaran publik yang terdiri dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia, yang beroperasi di daerah. Pers maupun lembaga penyiaran harus independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan sosial untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Korban kekerasan terhadap jurnalis yang dipicu oleh transparansi pemberitaan masih ada. Menurut Bram (korban atau jurnalis), bahwa ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di rumah tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu. Kasus ini menunjukkan bahwa sejumlah entitas dalam pemerintahan dengan mengunggulkan kekuasaannya, tidak dapat menerima pemberitaan transparan menyangkut perilaku pemegang kekuasaan di daerah.

Transparansi pemberitaan mengenai tindakan aparat didukung oleh UU No.14/2008 tentang KIP. Bill Kovach dan Tom Rosenthal, menyebutkan transparansi informasi sebagai naluri kesadaran manusia untuk mengetahui hal-hal di luar dirinya. Hak ini diakui dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan tahun 1948 (Haryanto, 2010:7).

Media massa lokal sebagai saluran informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri, sudah dilindungi oleh UU No.40/1999 dan UU No.32/2002, yang menjaga moralitas, nilai agama,

jati diri bangsa di lingkungan masyarakat majemuk yang memiliki sejumlah perbedaan. Hal ini berkaitan dengan komunikasi antarbudaya, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bisa dihindari jika ada kesediaan menyesuaikan diri untuk membentuk makna bersama (Samovar, Porter, dan Mc. Daniel, 2005: 259).

Berita tentang jurnalis korban kekerasan yang mengadu ke DPR, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang belum dapat menerima kebebasan pers. Kekritisan media lokal yang berujung kepada penganiayaan wartawan, tidak sejalan dengan prinsip regulasi media di Indonesia.

Konflik Media Lokal Versus Kekuasaan

Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan UU No.32/2002, yang memberikan keleluasaan penerbitan dan penyiaran, mendorong tumbuhnya media lokal. Tumbuhnya media lokal sesungguhnya bentuk perlawanan terhadap dominasi media nasional yang terlalu berorientasi pada pemberitaan sentralistis. Media lokal disinyalir tidak dapat menjalankan fungsi media dengan baik, sehingga merugikan masyarakat yang mengharapkan informasi berimbang dan transparan sesuai tuntutan keterbukaan dalam komunikasi.

Implikasinya, tidak semua berita di media lokal, dapat diterima oleh khalayak. Hal ini terlihat pada pemberitaan *Kompas.com*, pada 17 Februari 2008 mengenai “Bupati Manggarai Barat Bantah Dalangi Tindak Kekerasan terhadap Wartawan”. Intinya, Bupati Manggarai Barat membantah keras, bahwa pihaknya telah mendalangi kasus penganiayaan wartawan Pos Kupang, Yacobus Lewanmeru, di Labuan Bajo (kota kabupaten), Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Penganiayaan terhadap wartawan oleh aparat, lazim dipicu oleh ketidaksenangan terhadap berita yang dianggap merugikan. Media lokal menjalankan fungsi transparansi sesuai dengan UU KIP dan tuntutan demokratisasi pemerintahan lokal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat setempat.

Kompleksitas tugas pemerintahan daerah, tidak mungkin dijalankan aparat pemerintah daerah tanpa didukung oleh media massa lokal. Pemberitaan media lokal, justru memicu konflik dengan aparat pemerintah daerah maupun masyarakat,

akibat penafsiran teks-teks pemberitaan yang berbeda.

Perbedaan persepsi dan kepentingan masyarakat dan media, tidak bisa lepas dari perjalanan pers di Indonesia (Sudibyo, 2009). Sebelum reformasi politik tahun 1998 pemerintah menggunakan sistem pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam konteks *The Four Theory of the Press*, ada kecenderungan mengarah ke “salah satu prinsip” dalam *Authoritarian Theory*, yang memposisikan pers mendukung kebijakan pemerintah dan berhak melakukan sensor. Secara moderat, Indonesia lebih condong kepada Teori Media Pembangunan yang mengeksplorasi keserasian dalam kehidupan bermasyarakat (McQuail, 1991:119). Bagi kepentingan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan atau membatasi pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Pola media pembangunan ini lazim digunakan di negara-negara yang sedang berkembang (Jayaweera dan Amunugama, 1987:42).

Dalam koridor pers pembangunan, semua informasi yang didifusikan oleh media, telah melalui proses pengawasan berlapis, sehingga berita yang muncul sesuai dengan kehendak pemerintah. Dampaknya, berita yang mengungkap sisi gelap peristiwa di masyarakat, tidak pernah muncul di media. Pemberitaan ditekankan untuk menjaga situasi harmoni dalam perspektif serasi, selaras dan seimbang. Sekalipun sekelompok masyarakat tidak puas, mereka sulit untuk menyuarakan pendapatnya.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat terlebih elite dalam pemerintahan dan masyarakat, terbiasa dalam lingkaran pemberitaan yang datar tanpa gejolak. Ketika reformasi politik membuka peluang munculnya pers bebas di daerah, terdapat prinsip kebebasan informasi. Sejumlah entitas yang semula memperoleh perlindungan “manajemen pemberitaan pemerintah”, merasa tidak nyaman dan menuduh pers era reformasi kebablasan dan berpotensi memicu munculnya konflik. Terdapat media yang terlampaui bebas dan tidak menghiraukan peraturan yang berlaku, tetapi transparansi informasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara substantif, kebebasan pers yang sudah dinikmati masyarakat, tetap berpotensi menimbulkan konflik antara media lokal dengan pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Ini disebabkan institusi pemerintah masih memposisikan sebagai pengendali informasi. Media lokal berupaya menjalankan fungsi keterbukaan dan profesionalisme dalam pemberitaan.

Demokrasi dalam Pemerintahan di Daerah

Membangun keberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan tujuan ideal media massa. Salah satu penanda keberadaban adalah kebebasan. Mac Bride (1980:46) menyatakan bahwa, “kebebasan adalah syarat demokrasi yang paling berharga, biasanya diperoleh melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan ekonomi, politik dan penguasa dengan banyak pengorbanan, bahkan jiwa sekaligus”. Dengan demikian kebebasan merupakan penjaga demokrasi yang ampuh.

Demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan” (Riwukaho, 1991:7). Pendekatan komunikasi, menempatkan individu sebagai *partner* yang aktif, bukan hanya sebagai objek komunikasi saja, tetapi membentuk keanekaragaman pesan. Masalahnya makna demokrasi seringkali direduksi oleh kepentingan kelompok dengan menerapkannya secara integralistik sesuai kepentingan.

Menurut Porter dan Samovar, reformasi politik memberikan kebebasan kepada media lokal dalam fungsi penyampaian pesan, elite dalam kekuasaan negara terjerat penafsiran sepihak, yang memberikan makna demokrasi kepentingannya. Secara esensial dalam masyarakat majemuk yang demokratis, kesadaran untuk memahami perbedaan demi hubungan yang positif sangat diperlukan (Mulyana dan Rakhmat, 2010:35).

Mencermati kekuatan media lokal dalam menjalankan kebebasan informasi, elite dalam tubuh pemerintah, berupaya melakukan pendekatan kepada pers. Tanpa dukungan pers, mereka tidak bisa dikenal secara luas dan tidak mendapat dukungan masyarakat di daerah. Berita

Kompas.com, 21 Juni 2009 dengan judul “Dekati Pers, Kalla Kunjungi Redaksi Koran Lokal”. Dalam kunjungan M. Jusuf Kalla ke kantor redaksi media lokal, disebut-sebut bagian dari pendekatan ke sejumlah pimpinan redaksi lokal menjelang Pemilu Presiden dan Wapres, 8 Juli 2009. Kalla ingin mengetahui cara kerja media lokal dalam menyampaikan pemberitaan. Setelah ke Gedung Suara Merdeka, Kalla dijadwalkan akan menemui pimpinan dan jajaran redaksi Solo Pos di Kota Solo, pada sore harinya. Berita ini menunjukkan, bahwa dalam demokrasi informasi, pemegang kekuasaan memerlukan peran media lokal.

Hal ini senada dengan pendapat Gordon dan kawan-kawan bahwa “liputan media massa memiliki rekam jejak yang terbukti dapat menjadi kontributor penting dalam memahami tindakan masyarakat.” Dengan kata lain, media massa membawa pesan yang bermanfaat untuk memahami lingkungan sekitarnya (Priest 2010:68).

Regulasi media massa memberikan kebebasan kepada pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk tidak dapat menggunakan media sebagai instrumen politik. Hal ini terjadi karena pers sudah memiliki kemandirian dalam menyuarakan perlunya transparansi sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal yang menjadi persoalan dalam semangat untuk mengendalikan media, tidak semua aparat pemerintahan di daerah mau menerima demokrasi dan kebebasan informasi. Ini sesuai pendapat Lippman bahwa “demokrasi berbahaya bagi pemerintahan otoriter, karena agen komunikasi massa modern, membentuk kelompok sosial yang berpengetahuan dan berakar pada realita”. Pengetahuan tentang realitas diasumsikan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan (Delia, 1987:28).

Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan UU No.32/2002 sudah tidak ada lagi upaya pengendalian media dari pemerintah. UU No.14/2008 mengamanatkan keterbukaan informasi dalam rangka membentuk masyarakat informasi yang berdasarkan pada kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dalam kendala kultural dan birokrasi

pemerintahan di daerah, memang transparansi yang dapat mendorong tumbuhnya demokrasi tidak mudah untuk dijalankan oleh media lokal.

Terlepas dari sikap sejumlah pihak yang tidak mendukung transparansi, media massa lokal juga belum sepenuhnya menjalankan pers yang transparan, karena keterbatasan dana dan profesionalisme jurnalis. Hal ini berdampak bahwa media lokal melakukan ambuguitas dalam pemberitaan. Di satu sisi media lokal berusaha menjaga independensi, di sisi lain media tersebut memihak pemerintah atau kelompok-kelompok yang membantu ataupun terkait dengan pendanaan.

Media lokal memerlukan dana untuk menjalankan fungsi bisnis, tetapi harus mengedepankan informasi yang transparan kepada khalayak. Jadi ada keseimbangan antara ideologi media untuk menjalankan fungsi dan orientasi bisnis media massa lokal.

Harapan terhadap Peran Media Lokal

Pemberitaan tentang media lokal di *Kompas.com* juga mengapresiasi pernyataan-pernyataan tekstual, yang berisi harapan masyarakat terhadap peran media dalam membangun demokratisasi dalam pemerintahan di daerah yang berbijak kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak bisa diabaikan, hubungan antara media lokal dengan pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Ada sejumlah masalah yang menyebabkan penyimpangan fungsi media, misalnya menyangkut ketergantungan dana dalam menjalankan roda organisasi di media cetak maupun media elektronik. Kondisi itu terlihat dalam *Kompas.com* 20 Januari 2011, “Upah Jurnalis di Surabaya Belum Layak”. Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini melemahkan idealisme wartawan (<http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.Layak>, diakses 10 April 2011). Problem keuangan mengakibatkan media memiliki ketergantungan terhadap mereka yang mempunyai “kekuatan dana”, seperti pemerintah daerah dan para pemilik modal yang memiliki kontrak dalam pembelian halaman atau ruang pemberitaan media. Pola semacam ini mengakibatkan, media lokal tidak mempunyai kemandirian dalam pemberitaan, sesuai

dengan peraturan tentang media, maupun transparansi sejalan dengan UU KIP No.14/2008.

Faktor lain yang menghambat peran media lokal adalah kekuatan kelompok masyarakat yang memiliki otoritas dalam mempengaruhi opini publik. Apabila suatu kelompok tidak sejalan dengan pemberitaan media, mereka menggunakan cara sendiri untuk menekan media lokal supaya mengikuti pemberitaan yang dikehendaki. Masalah yang menghambat berasal dari dalam organisasi media lokal sendiri, yang menghadapi independensi pemberitaan dan penyiaran. Sebagai contoh, para jurnalis media sudah bertindak profesional dalam mengonstruksi peristiwa untuk pemberitaan yang mengarah pada demokratisasi dalam pemerintahan. Hal ini tidak selalu disepakati oleh pemilik media, yang memiliki hegemoni “pengaturan” karena pertimbangan bisnis. Pada konteks penggunaan kekuasaan ini, pemilik modal media dan para penyandang dana, tidak bisa dilawan jurnalis, yang memiliki ketergantungan kelembagaan.

Pemberitaan menyangkut media lokal yang dinilai tidak menyuarkan demokrasi dalam pelayanan publik dapat dilihat di *Kompas.com* tanggal 3 Januari 2011, “Riau, Negeri Para Hedonis?”. Koran terbitan Riau hanya berisi acara seremonial didanai uang rakyat dari APBD terpampang hampir pada semua koran terkemuka daerah. Isi sebuah koran didominasi acara-acara seremonial belaka (<http://regional.kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau.Negeri.Para.Hedonis-5> (diakses 13 April 2011)).

Media massa lokal seharusnya memberikan manfaat yang dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, bukan untuk memberitakan seremoni yang justru mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan Teori Tanggung Jawab Sosial dalam *The Four Theory of Press*. Media selayaknya memberikan manfaat yang menyuarkan demokrasi pemerintahan dengan memberikan kekuatan sosial, ekonomi dan politik kepada masyarakat, sejalan dengan berbagai regulasi media yang sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Secara substantif, teks-teks pernyataan dalam media massa lokal menandakan harapan

masyarakat, agar media lokal menjalankan fungsi sesuai dengan UU No.40/1999, UU No. 32/2002, dan UU No.14/2008 yang berpihak kepada pemberian informasi berkualitas yang bermanfaat dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Simpulan

Penelitian ini menemukan tiga kategori pemberitaan tentang karakteristik media yang sejalan dengan *The Four Theory of the Press* dan paradigma sistem pers Pancasila yang “masih” melekat pada sejumlah entitas pemerintahan di daerah.

Kategori yang pertama, informasi dan kekritisan media lokal. Kebebasan informasi yang didukung oleh peraturan tentang pers dan penyiaran serta UU No.14/2008 yang mengamanatkan Keterbukaan Informasi Publik, dapat mendorong media lokal menjalankan fungsi pemberitaan dengan transparan, berdasarkan konstruksi peristiwa yang tetap merujuk kepada nilai Pancasila dan UUD 1945. Transparansi bagi sejumlah pihak di pemerintahan, justru dianggap merugikan, sehingga jurnalis sebagai representasi dari media, mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan lokal.

Kedua, konflik antara media lokal dengan kekuasaan. Keterbukaan informasi belum sepenuhnya dapat diterima oleh elite dalam pemerintah. Pemerintah sebagai badan publik, seharusnya memahami pentingnya berita yang terbuka dan faktual sesuai dengan ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP. Elite pemerintahan mengandalkan hegemoni kekuasaan dalam penguasaan media. Mereka justru berusaha untuk mengendalikan media sesuai dengan kepentingannya. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik, karena media berupaya profesional dalam menjalankan fungsi pemberitaan, sedangkan pemilik kekuasaan dalam pemerintahan di daerah memosisikan sebagai pemilik yang mengatur isi media.

Dalam kategori ketiga, tentang demokrasi dalam pemerintahan di daerah, *Kompas.com* memosisikan media lokal dapat membawa iklim demokrasi kehidupan pemerintahan di daerah. Hal ini ditandai dengan kesadaran elite untuk menempatkan media sebagai entitas yang dapat men-

dukung kegiatan berdemokrasi. Persoalannya, ternyata media lokal juga menghadapi hambatan dalam hal modal dan profesionalisme. Hal ini berakibat media massa juga dipakai sebagai alat melegitimasi kebijakan oleh aparat pemerintahan daerah atau para pemilik modal.

Selain ketiga kategori itu, pemberitaan *Kompas.com* yang menelaah eksistensi media lokal dalam membangun demokrasi di daerah adalah, harapan tentang peran media lokal. Ketika pemberitaan media lokal yang independen menjadi tuntutan, maka masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol, agar media lokal berjalan sesuai dengan demokratisasi bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan. Keberadaan media lokal masih tetap diperlukan sebagai salah satu ujung tombak dalam membangun demokratisasi di daerah yang sesuai dengan kebhinekaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Implikasi penelitian ini bahwa *Kompas.com* hendaknya dalam memberitakan dinamika media lokal di daerah sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam UU No.14/2008 tentang KIP. Ini diperlukan untuk menambah wawasan pembaca tentang eksistensi media lokal dalam membangun demokratisasi pemerintahan di daerah. Saran untuk pembaca, mengingat *Kompas.com* sebagai media *online* yang independen, hendaknya pemahaman teks-teks yang terdapat dalam pemberitaan tentang media lokal dan pelaksanaan demokrasi pemerintahan di daerah disikapi secara proporsional dengan tidak mengeksplorasi prasangka.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ketua Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Universitas Tarumanagara Jakarta, Ir. Jap Tji Beng, M.Si, Ph.D, yang telah melegalisasi penelitian tentang *Dinamika Media Lokal dalam Membangun Demokratisasi Pemerintahan di Daerah*, dan mengikutsertakan hasil penelitian dalam *Research Week Untar 2011*.

Daftar Pustaka

Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G.Godfrey, 2001, *Electronic Media*, Wadsworth Thomson Learning, Australia.

- Delia, Jesse G, 1987, *Communication Research: A History*, dalam Charles R. Berger (ed), 1987, *Handbook of Communication*, Sage Publication, California Newbury.
- Gordon, Joy C, Tina Deines, and Jacqueline Havice, 2010, *Global Warming Coverage in the Media: Trends in a Mexico City Newspaper*, dalam Susanna Hornig Priest (ed), 2010, *Science Communication*, Volume 32 Number 2, June 2010, Sage Publication, Manhattan.
- Haryanto, Ignatius, 2010, *Media di bawah Dominasi Modal: Ancaman Terhadap Hak atas Informasi*, dalam *Majalah Asasi*, Edisi Maret–April 2010.
- <http://regional.kompas.com/read/2010/05/19/20321534/Pelanggaran.dalam.Pilkada.di.Kalbar,Rabu,12Januari2011>.
- <http://cetak.kompas.com/read/2008/02/22/12223420/bupati.manggarai.barat.bantah.dalangi.tindak.kekerasan.terhadap.wartawan>, Jumat, 14 Januari 2011.
- <http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.Layak,diakses10April2011>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/09/22322463/Pers.Harus.Sensor.Diri.Sendiri,diakses11April2011>.
- <http://regional.kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau.Negeri.Para.Hedonis-5,akses13April2011>.
- Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama (eds), 1987, *Rethinking Development Communication: The Asia Mass Communication*, Kefford Press Pte Ltd Singapore.
- Jebarus, Felix, 2011, *Pertarungan Kepentingan tentang Kebebasan Informasi (Syudi Dinamika Komunikasi dalam Proses Penyusunan dan Pembahasan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik)*, *Disertasi* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Depok.
- Kompas, 16 Juni 2011, *survey Pengguna Internet*.
- MacBride, Sean, 1980, *Communication and Society Today and Tomorrow: Many Voices One World*, Kogan Page, London.
- Majalah Asasi, 1999, *Analisa Dokumentasi Hak Asasi Manusia*, Juni 1999, ELSAM, Jakarta.
- Media Planning Guide Indonesia, 2008, *An Essential Tool for Everybody working in or with, the Media in Indonesia*, First Edition, A Publication of Perception Media/ PT. Strategi Komunindo, Jakarta.
- McQuail, Denis, 1991, *Teori Komunikasi: Suatu Pengantar*, *Terjemahan Agus Dharma & Aminuddin Ran*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- McQuail, Denis, 2010, *Mass Communication Theory*, 6th Edition, Sage Publication, London.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman, 1993, *Qualitative Data Analysis*, atau *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi, Jakarta: Univ. Indonesia Press, Bandung.
- Moleong, Lexi J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Morissan dan Andy C. Wardhani, 2009, *Teori Komunikasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, 2010, *Komunikasi Antarbudaya*.
- Novianti, Dewi, 2010, *Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada detik.com dan Tempo Interaktif*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8, Nomor 2, Mei–Agustus 2010, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riwukaho, Josef, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Rubin, Rebecca B, Alan M. Rubin, and Linda J. Piele, 2005, *Communication Research: Strategies an Source*, Thomson– Wadsworth, Belmont, CA.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter and Edwin R. McDaniel, 2005, *Communication Between Cultures*, Sixth Edition, thomson Wadsworth, Australia .

- Severin, Werner J dan James W. Tankard Jr, 2009, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan dalam Media Massa*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Silverman, David, 1993, *Intepreting Qualitative Data : Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, Sage Publishing, New York.
- Suwardi, Harsono, 1993, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudibyo, Agus, 2010, *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Subiyakto, Henry, 2008, *Analisis Isi, Manfaat, dan Metode Penelitiannya, dalam bagong Suyanto dan Sutinah (ed), 2008, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Ekologi Pemerintahan*, Penerbit PT Perca, Jakarta.
- Urofsky, Melvin I., 2001, *Naskah Pertama Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, dalam “Buku Demokrasi”, Office of International Information Programs–USIS Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2010, “Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi”, Penerbit Visi Media, Jakarta.
- Undang–Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 1982, tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. Tahun 1967.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta.